

ABSTRAK

Pusaran konflik geopolitik di Timur Tengah sejak tahun 2010-an mendorong Qatar untuk melakukan transformasi kebijakan pertahanannya. Transformasi tersebut didukung oleh sejumlah faktor strategis, di antaranya adalah ketimpangan struktural antara Qatar dengan dua aktor hegemoni regional, Arab Saudi dan Iran; sokongan kekuatan finansial dan energi yang menjadi tulang punggung ekonomi Qatar; hingga kepentingan domestik dari Qatar sendiri, baik dalam lingkup elite maupun Pemerintah Qatar secara umum. Dengan menggunakan konsep *strategic hedging*, skripsi ini berupaya untuk menganalisis kebijakan pertahanan sebagai manifestasi bagi politik luar negeri Qatar yang berlandaskan netralitas regional dan pragmatisme. Sektor pertahanan yang berkualitas dan memiliki daya gentar menjadi pilar krusial bagi Qatar untuk bermanuver secara politik demi menghindari dan membendung ancaman kekuatan hegemoni di sekitarnya yang kian nyata pascatahun 2010-an. Ditambah lagi, transformasi kebijakan pertahanan juga sejalan dengan kepentingan Qatar untuk memperluas pengaruh.

Dalam menganalisis transformasi kebijakan pertahanan, skripsi ini akan berfokus pada tiga aspek sentral. Pertama, adalah transformasi fundamental pertahanan, yakni doktrin pertahanan yang menjadi landasan bagi aspek-aspek lanjutan. Kedua, adalah modernisasi pertahanan Qatar yang secara spesifik terbagi dalam empat aspek: manajemen anggaran pertahanan, akuisisi alat utama sistem persenjataan, manajemen sumber daya manusia militer, dan pengembangan industri pertahanan. Modernisasi menjadi bagian yang sentral dalam inovasi pertahanan, seiring dengan tujuannya sebagai peningkatan kualitas dan kuantitas kekuatan pertahanan secara bertahap. Terakhir, adalah upaya Qatar untuk meningkatkan nilai tawarnya dalam bidang politik-keamanan dengan melakukan kemitraan dengan negara-negara dengan industri pertahanan maju, yakni Amerika Serikat, Inggris, Prancis, dan Turki. Hal yang dapat disimpulkan dari skripsi ini adalah bahwa posisi Qatar sebagai negara kecil tidak lantas membatasinya untuk secara strategis mempertahankan posisinya sekaligus memperluas pengaruhnya secara regional. Pemerintah Qatar mampu secara fleksibel mengarahkan kebijakan nasionalnya untuk memperoleh keuntungan dan menghindari ancaman.

Kata kunci: Qatar, kebijakan pertahanan, *strategic hedging*, Timur Tengah

ABSTRACT

The vortex of geopolitical conflict in the Middle East since the 2010s has pushed Qatar to transform its defense policy. This transformation is supported by a number of strategic factors, including structural inequality between Qatar and the two regional hegemonic actors, Saudi Arabia and Iran; the financial and energy sector that forms the backbone of Qatar's economy; to the domestic interests of Qatar itself, both within the elite and the Qatari government in general. By using the concept of strategic hedging, this thesis attempts to analyze defense policy as a manifestation of Qatar's foreign policy which is based on regional neutrality and pragmatism. The developed defense sector which adequate deterrence effect has become a crucial pillar for Qatar to maneuver politically to avoid and keep the threats of the surrounding hegemonic power on check. In addition, the transformation of defense policy is also in line with Qatar's interest in expanding its influence.

In analyzing the transformation of Qatar's defense policy, this thesis will be focused on three central aspects. First, is the fundamental transformation of military doctrine which is the basis for military innovation. Second, is the modernization of Qatar's defense sector which is specifically divided into four parts: defense budget management, acquisition of major weapons systems, management of military human resources, and development of the defense industry. Military modernization is a central part of defense innovation, in line with its goal of gradually increasing the quality and quantity of defense forces. Lastly, is Qatar's effort to increase its bargaining power by partnering with countries with advanced defense industries, including the United States, United Kingdom, France, and Turkey. The conclusion of this thesis is that Qatar's position as a small country does not necessarily limit it from strategically maintaining its position as well as expanding its influence regionally. The Qatari government is able to flexibly direct its national policies to gain advantage and avoid regional threats.

Keywords: Qatar, defense policy, strategic hedging, The Middle East